

Judul : Kejagung Usut Dugaan Pencucian Uang Garuda
Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Kejagung Usut Dugaan Pencucian Uang Garuda

Kejaksanaan Agung memastikan dukungan pembersihan Garuda tidak berakhir pada kasus pengadaan pesawat ATR 72-600.

TRI SUBARKAH
tri@mediaindonesia.com

SELAIN mengusut dugaan korupsi jumbo di PT Garuda Indonesia (persero) Tbk, Kejaksaan Agung juga bergerak menanggapi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tersebut.

Demikian penegasan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi di Gedung Bunder Kejagung, Jakarta, Rabu (12/1) malam. "Pokoknya kami kalau menangani perkara ketika ada TPPU-nya pasti kami gas," kata Supardi.

Saat ini penyidik Kejagung masih menyelidiki dugaan korupsi terkait penggelembungan (*mark-up*) harga pengadaan pesawat Garuda. Rasuah itu terjadi saat maskapai pelat merah itu dikomandani Emirshyah Satar.

Emirshyah saat ini mendekam di LP Sukamiskin, Jawa Barat, akibat kasus penerimaan suap dari pemilik Connaught International, PT Mugi Rekso Abadi, dan PT Ardhyaparamita Ayuprakasa.

Suap itu diberikan terkait

realisasi pengadaan program *total care* mesin Rolls-Royce Trent 700, pesawat Airbus A330-300/200, Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, Bombardier CRJ 1.000, dan ATR 72-600.

Selain suap, Emirshyah divonis bersalah melakukan TPPU. Majelis hakim menghukum pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan. Emirshyah juga diberikan hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Sin\$2.117 juta.

"Kami juga berkoordinasi dengan PPATK. Nanti kami cari (aliran dananya), yang penting ada dulu peristiwanya (pidana). Nanti kami perdalam di proses penyidikan," lanjut Supardi.

Konsisten

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Martin Manurung mendukung upaya Menteri

BUMN Erick Thohir menyelesaikan kasus hukum di Garuda. Wakil Ketua Komisi VI DPR itu menegaskan pihaknya sudah menyampaikan langkah penegakan hukum itu harus dilakukan dan tidak dapat ditunda lagi.

"Upaya itu akan membantu proses restrukturisasi yang sedang dilakukan atas Garuda agar tidak ada dugaan bahwa ada yang ditutup-tutupi dalam permasalahan masa lalu yang membuat Garuda bermasalah saat ini. Bahkan *technically* bangkrut atau secara teknis sudah bangkrut," ujar Martin.

Martin meminta agar rencana Erick untuk menuntaskan persoalan Garuda sampai benar-benar bersih tidak berhenti pada masalah penyewaan pesawat ATR 72-600 dan tetap dilakukan secara konsisten.

"Bongkar sekalian saat ini dan perbaiki semua sistem manajemen agar ke depan tidak ada masalah lagi," ungkap Martin.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan dukungan internal kejaksanaan untuk membantu pembersihan BUMN tersebut tidak berakhir pada kasus yang melibatkan pengadaan pesawat ATR 72-600 oleh Garuda.

"Kalau pengembangan, pasti. Insha Allah tidak akan berhenti di sini. Kami akan kembangkan sampai Garuda ini benar-benar bersih," kata Burhanuddin.

Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin ketika menanggapi kemungkinan adanya kasus penyelewengan lain di Garuda yang melibatkan merek berbeda terkait proses pengadaan pesawat terbang serta *lessor* atau perusahaan yang menyediakan jasa menyewakan barang dalam bentuk guna usaha. (Ant/X-3)

Dugaan Korupsi di Tubuh Garuda Indonesia

Beberapa Dugaan Kasus

Tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mark up atau penggelembungan harga pengadaan pesawat.

Dugaan korupsi terjadi pada masa kepemimpinan Emirshyah Satar pada 2005-2014.

Kasus Korupsi yang Menjerat Emirshyah Satar

- Penerimaan suap pengadaan *total care* program mesin.
- Melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
- Tindak pidana suap melibatkan pemilik Connaught International, PT Mugi Rekso Abadi, dan PT Ardhyaparamita Ayuprakasa.
- Program *total care*, program mesin ini direncanakan untuk Rolls-Royce Trent 700, pesawat Airbus A330-300/200, Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, Bombardier CRJ 1.000, dan ATR 72-600.

Realisasi Pengadaan

- 50 pesawat ATR 72-600 (5 unit melalui skema pembelian, 45 unit sewa).
- 18 pesawat CRJ 1000 (12 unit sewa dan 6 unit skema pembelian).

Kasus yang Sedang Dikerjakan Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung

Pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 dan CRJ 1000 (Bombardier). Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2014, penambahan armada direncanakan sebanyak 64 pesawat.

Sumber: Kejagung/Garuda Indonesia/Libang MI/ Grafik: SENO

